



TESIS

Judul:

PENGENAAN PAJAK DALAM PEROLEHAN HAK PROPERTI
BAGI WARGA NEGARA ASING (PERBANDINGAN
INDONESIA
DAN SINGAPURA)

Disusun oleh:

ILLONA
NIM. 217221024

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

PENGENAAN PAJAK DALAM PEROLEHAN HAK PROPERTI BAGI
WARGA NEGARA ASING (PERBANDINGAN INDONESIA DAN
SINGAPURA)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

ILLONA

NIM. 217221024

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

Pengesahan

Nama : ILLONA
NIM : 217221024
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : PENGENAAN PAJAK DALAM PEROLEHAN HAK
PROPERTI BAGI WARGA NEGARA ASING
(PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA)
Title : TAX IMPOSITION IN THE ACQUISITION OF PROPERTY
RIGHTS FOR FOREIGN CITIZENS (COMPARISON OF
INDONESIA AND SINGAPORE)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

Tim Penguji:

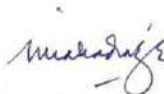
1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. JEANE NELTJE, S.H., M.H., APU., Dr., Prof.
3. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
JEANE NELTJE, S.H., M.H., APU., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10211001



Jakarta, 18-Januari-2024
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

Persetujuan

Nama : ILLONA
NIM : 217221024
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : PENGENAAN PAJAK DALAM PEROLEHAN HAK
PROPERTI BAGI WARGA NEGARA ASING
(PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 14-Desember-2023

Pembimbing:
JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
NIK/NIP: 10211001



ABSTRAK

(A) Nama: Illona (NIM: 217221024)

(B) Judul Tesis: Pengenaan Pajak Dalam Perolehan Hak Properti Bagi Warga Negara Asing (Perbandingan Indonesia dan Singapura)

(C) Halaman: XVIII+162+45+2024

(D) Kata Kunci:

Perbandingan, Pengenaan Pajak, Hak Properti, Warga Negara Asing, Indonesia, Singapura

(E) Isi:

Perkembangan global saat ini telah membuka peluang bagi WNA untuk memperoleh properti di luar batas wilayah negaranya. Banyak negara yang telah mengatur perihal perolehan hak properti sampai dengan pengaturan mengenai pengenaan pajaknya dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam implementasinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengatur terkait hal tersebut bahkan telah memberikan kemudahan dalam pengaturan perpajakannya untuk mendorong kemajuan ekonomi di sektor properti. Namun realisasi terkait dengan perkembangan kegiatan usaha melalui investasi properti oleh WNA di Indonesia sampai saat ini tidak mengalami kemajuan secara signifikan dibandingkan dengan Singapura. Berlandaskan demikian maka penulis memaparkan permasalahan tentang bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan pengenaan pajak terkait perolehan hak atas properti bagi WNA antara Indonesia dan Singapura dan bagaimana pengaturan hukum yang dapat diadaptasi oleh Indonesia dari perbandingan hukum pengenaan pajak terkait perolehan hak atas properti dengan Singapura? Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan metode penelitian normatif menggunakan pendekatan perbandingan atau komparatif dan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Perbandingan pengenaan pajak dalam perolehan hak properti bagi WNA menghasilkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan dapat terlihat dalam jenis pajak PBB di Indonesia yang sama dengan APT di Singapura dan otoritas yang berwenang perihal pengurusan pajak. Perbedaan terdapat macam pajak lainnya, tarif, dasar pengenaan, tata cara pemungutan, perlakuan pajak dan sistem pemungutan pajak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain berbeda pada masing-masing negara. Indonesia yang tidak tertinggal dalam regulasi dapat mengadaptasi kepastian hukum dalam pelaksanaan pengenaan pajak dalam perolehan hak properti bagi WNA di negara ini.

(F) Acuan: 80 (1929-2023)

(G) Pembimbing: Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.

(H) Penulis:

Illona

ABSTRACT

(A) Name: Illona (NIM: 217221024)

(B) Thesis Title: Tax Imposition in The Acquisition of Property Rights for Foreign Citizens (Comparison of Indonesia and Singapore)

(C) Pages: XVIII+162+45+2024

(D) Keywords:

Comparison, Taxation, Property Rights, Foreign Nationals, Indonesia, Singapore

(E) Isi:

The current global development has opened opportunities for foreigners to acquire property beyond their national borders. Many countries have regulated the acquisition of property rights, including the taxation aspect, aiming to provide legal certainty in their implementation. Indonesia is one of the countries that has regulated these matters and has even facilitated tax regulations to promote economic growth in the property sector. However, the realization regarding the development of business activities through property investment by foreigners in Indonesia has not progressed significantly compared to Singapore. Based on this, the author raises the issues surrounding the similarities and differences in tax imposition regulations related to the acquisition of property rights for foreigners between Indonesia and Singapore, and how legal regulations from comparative study to Singapore's tax imposition laws on property acquisition rights can be adapted by Indonesia. This research utilizes normative research method with a comparative approach and legal analysis, using literature review as the data collection technique. The comparison of tax imposition on property acquisition for foreigners reveals both similarities and differences. Similarities can be observed in the type of property tax in Indonesia, which is similar to the *Annual Property Tax* (APT) in Singapore, as well as the authorities responsible for tax management. Differences exist in other types of taxes, rates, tax bases, collection procedures, tax treatment, and tax collection systems influenced by different factors in each country. Indonesia, not lagging behind in regulations, can adapt legal certainty in the implementation of tax imposition on the acquisition of property rights for foreigners in this country.

(F) References: 80 (1929-2023)

(G) Mentor: Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.

(H) Author:

Illona

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kekuatan, anugerah dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “PENGENAAN PAJAK DALAM PEROLEHAN HAK PROPERTI BAGI WARGA NEGARA ASING (PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA)”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyadari bahwa penulis banyak memperoleh bimbingan, pengarahan, saran-saran serta bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU, selaku dosen pembimbing yang dengan baik hati dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, pikiran, dan pengarahan dalam bimbingan penyusunan tesis ini dari awal hingga selesai;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas ilmu yang diberikan selama penulis menjalankan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini;

7. Kedua orang tua penulis yaitu Papa Tan Alim, S.E., M.Ak., BKP dan Mama Istyaty Halim, S.E., dan ketiga adik penulis, Jovita Edlyn S.Psi., Janice Clairine Tertia, S.Ak., Joshua yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran mendoakan dan mendukung penulis selama penyusunan tesis ini;
8. Para sahabat penulis selama berkuliah yang senantiasa menemani, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, Ria Veronica, S.H., Risko Fitriano, S.H., Rafki Ali Mahdafi, S.H., William Antonius S.H., Altina Intan Nurfadila S.H. dan teman-teman lainnya di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara, khususnya angkatan ke 12 2022, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
9. Inne Christina, S.H., Irma Widyanti, S.Pd. selaku teman dekat penulis yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moril kepada penulis;
10. Bapak Kiki Hertanto S.H. Sp.N., selaku PPAT yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk di wawancara selaku narasumber oleh penulis;
11. Bapak Budi Hermawan, selaku Pengurus dari Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (DPP REI) Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Perpajakan yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk di wawancara selaku narasumber oleh penulis;
12. Bapak dan Ibu dari Bidang Peraturan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk di wawancara selaku narasumber oleh penulis;
13. Semua pihak lainnya yang telah membantu penulis dalam bentuk apapun selama penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis, dengan segala kerendahan hati, sangat diharapkan guna memberikan perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Terlepas dari kesadaran penulis akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki penulis selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Magister Kenotariatan, penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 14 Desember 2023

Penulis

Illona

Pernyataan

Nama : ILLONA
NIM : 217221024
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : PENGENAAN PAJAK DALAM PEROLEHAN HAK
PROPERTI BAGI WARGA NEGARA ASING
(PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14-Desember-2023
Yang menyatakan



ILLONA
NIM. 217221024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PENGESAHAN	II
PERSETUJUAN.....	III
ABSTRAK	IV
ABSTRACT	V
KATA PENGANTAR	VI
ORISINALITAS	IX
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
DAFTAR SINGKATAN	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	14
C. Kerangka Konseptual	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian	17
E. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	18
4. Pendekatan Penelitian	20
5. Teknik Analisis Data	21
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Pustaka Teori Perbandingan Hukum	23
1. Pengertian dan Terminologi Perbandingan Hukum	23

2. Perkembangan Perbandingan Hukum.....	26
3. Berbagai Pandangan dan Lingkup Perbandingan Hukum.....	27
4. Tujuan Perbandingan Hukum.....	29
5. Fungsi dan Manfaat Perbandingan Hukum.....	32
B. Tinjauan Pustaka Teori Tujuan Hukum.....	34
C. Tinjauan Pustaka Teori Pengenaan dan Pemungutan Pajak.....	40
1. Pengenaan Pajak.....	40
2. Pemungutan Pajak.....	45
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	52
A. Konsep Hukum Properti di Indonesia.....	52
B. Konsep Hukum Perpajakan di Indonesia.....	70
C. Tata Cara Perolehan Hak atas Properti bagi WNA di Indonesia.....	84
D. Regulasi Pajak Terkait Perolehan Hak atas Properti Bagi WNA di pIndonesia.....	94
a. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPPPD).....	94
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN).....	105
c. Pajak Penghasilan (PPh) - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan (UU PPH).....	116
d. Pajak Bumi Bangunan (PBB) - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.....	123
E. Regulasi Pajak Terkait Perolehan Hak atas Properti Bagi WNA di Singapura.....	127
1. <i>Stamp Duties Act 1929</i>	127
2. <i>Property Act 1960</i>	131
F. Hasil Wawancara.....	132
1. Wawancara dengan Bapak Kiki Hertanto sebagai PPAT.....	132
2. Wawancara dengan Bidang Peraturan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.....	133

3. Wawancara dengan Bapak Budi Hermawan selaku Pengurus Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (DPP REI) dan Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Perpajakan	137
BAB IV ANALISIS PEMASALAHAN	141
A. Persamaan Dan Perbedaan Pengaturan Pengenaan Pajak Terkait Perolehan Hak Atas Properti Bagi WNA antara Indonesia Dan Singapura 141	
1. Persamaan Pengaturan Pengenaan Pajak Terkait Perolehan Hak atas Properti Bagi WNA.....	141
2. Perbedaan Pengaturan Pengenaan Pajak Terkait Perolehan Hak atas Properti Bagi WNA.....	144
B. Pengaturan Hukum Yang Dapat Diadaptasi Oleh Indonesia Dari Perbandingan Hukum Pengenaan Pajak Terkait Perolehan Hak Atas Properti Dengan Singapura.....	148
BAB V PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA.....	155
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Kerangka Konseptual
Tabel 2	: Batasan Harga Minimal Rumah Tunggal
Tabel 3	: Batasan Harga Minimal Satuan Rumah Susun
Tabel 4	: <i>Singapore BSD Rates 2023</i>
Tabel 5	: <i>ABSD Rate 2023</i>
Tabel 6	: <i>Singapore's Owner-Occupier Tax Rates</i>
Tabel 7	: <i>Singapore's Non-Owner-Occupier Residential Tax Rates</i>
Tabel 8	: Perbandingan Persamaan Pengenaan Pajak Indonesia – Singapura
Tabel 9	: Perbandingan Perbedaan Pengenaan Pajak Indonesia – Singapura
Tabel 10	: Tarif Pajak Indonesia
Tabel 11	: Tarif Pajak Singapura

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : *Top 10 Cities for Cross Border Investment* (10 Kota Teratas untuk Investasi Lintas Batas)
- Gambar 2 : Jangka Waktu Hak Atas Tanah untuk Orang Asing
- Gambar 3 : Beda Pajak Pusat dan Pajak Daerah
- Gambar 4 : Alur 1 Pendaftaran e-SPPT PBB
- Gambar 5 : Alur 2 Pendaftaran e-SPPT PBB
- Gambar 6 : Alur 3 Pendaftaran e-SPPT PBB
- Gambar 7 : Tampilan Pendaftaran e-SPPT PBB
- Gambar 8 : Alur 4 Pendaftaran e-SPPT PBB
- Gambar 9 : Tampilan Pendaftaran e-SPPT PBB
- Gambar 10 : Contoh Dokumen SPPT PBB
- Gambar 11 : Tata Cara Perolehan Hak atas Properti bagi WNA di Indonesia Pemegang Passport
- Gambar 12 : Tata Cara Perolehan Hak atas Properti bagi WNA di Indonesia Pemegang KITAS/KITAP
- Gambar 13 : Contoh Dokumen Faktur Pajak
- Gambar 14 : Alur 1 Pembayaran BPHTB
- Gambar 15 : Alur 2 Pembayaran BPHTB
- Gambar 16 : Alur 3 Pembayaran BPHTB
- Gambar 17 : Alur 4 Pembayaran BPHTB
- Gambar 18 : Alur 5 Pembayaran BPHTB
- Gambar 19 : Alur 6 Pembayaran BPHTB
- Gambar 20 : Alur 7 Pembayaran BPHTB
- Gambar 21 : Alur 8 Pembayaran BPHTB
- Gambar 22 : Alur 9 Pembayaran BPHTB
- Gambar 23 : Alur 10 Pembayaran BPHTB
- Gambar 24 : Contoh Dokumen SSPD-BPHTB
- Gambar 25 : Surat Penegasan oleh DJP atas NPWP untuk Kepemilikan Hunian oleh Warga Negara Asing

DAFTAR SINGKATAN

ABSD	: <i>Additional Buyer's Stamp Duty</i>
AGO	: <i>Auditor-General's Office</i>
APT	: <i>Annual Property Tax</i>
BAPENDA	: Badan Pendapatan Daerah
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BSD	: <i>Buyer's Stamp Duties</i>
BUT	: Bentuk Usaha Tetap
CBRE	: <i>Coldwell Banker Richard Ellis Corporations</i>
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DPP	: Dasar Pengenaan Pajak
DPP REI	: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia
e-BPHTB	: Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
FP	: Faktur Pajak
GST	: <i>Goods and Services Tax</i>
HM	: Hak Milik
IRAS	: <i>Inland Revenue Authority of Singapore</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KITAS	: Kartu Izin Tinggal Terbatas
KITAP	: Kartu Izin Tinggal Tetap
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
NIORA	: Nomor Induk Orang Asing
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak

PEMDA	: Pemerintah Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
POA	: Properti Orang Asing
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPhTB	: Pajak Penghasilan sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan
PPh	: Pajak Penghasilan
PPJB	: Perjanjian Pendahuluan Jual Beli
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPN BM	: Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah
PR	: <i>Permanent Residence</i>
SBKT	: Surat Bukti Kepemilikan Tanah
SC	: <i>Singapore Citizen</i>
SKHAT	: Surat Keterangan Hak Atas Tanah
SPDN	: Subjek Pajak Dalam Negeri
SPLN	: Subjek Pajak Luar Negeri
SPOP	: Surat Pemberitahuan Obyek Pajak
SSPD	: Surat Setoran Pajak Daerah
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
UU	: Undang-Undang
UUCK	: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UUCK 2020	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UUD RI 1945	: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UUPA	: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
UU BPHTB	: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Bangunan

UU HKPPPD	: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
UU KUP	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU PBB	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
UU PPH	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan
UU PPN	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
VAT	: <i>Value Added Tax</i>
VOA	: <i>Visa on Arrival</i>
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia
WP	: Wajib Pajak

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Permohonan Calon Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Surat Tugas Penugasan Dosen Pembimbing Proposal Tesis
Lampiran 4	: Berita Acara Bimbingan Penyusunan Proposal Penelitian Tesis
Lampiran 5	: Persetujuan Proposal Tesis
Lampiran 6	: Pengesahan Proposal Tesis
Lampiran 7	: Formulir Kesiediaan Pembimbing Tesis
Lampiran 8	: Surat Tugas Penugasan Dosen Pembimbing Tesis
Lampiran 9	: Rekap Bimbingan Tesis
Lampiran 10	: Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 11	: <i>Letter of Acceptance</i> Jurnal
Lampiran 12	: Lembar Jurnal
Lampiran 13	: Bukti Wawancara